ISSN 2721-8767 (Cetak) ISSN 2722-1067 (Elektronik)

PENINGKATAN KINERJA GURU DALAM MENETAPKAN KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL MELALUI KEGIATAN *WORKSHOP* DI SMK MA'ARIF NU JATIREJO

Drs. ABDULLOH IROKHI, MM
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto

ABSTRAK

Kenyataan dilapangan guru dalam menetapkan KKM tidak berdasarkan analisis dan tidak memperhatikan prinsip serta langkah-langkah penetapan, oleh karena itu perlu ada kegiatan pada awal tahun pelajaran yang dapat memberikan informasi kepada guru yang dijadikan pedoman dalam penetapan KKM. Sudah saatnya sebagai guru yang profesional apalagi sudah lulus sertifikasi seyogianya terus meningkatkan kompetensinya, termasuk di dalamnya dalam menetapkan kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM tidak ditetapkan secara ngawur dan sembrono. Merupakan kontrak pedagogik antara guru dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Keberhasilan pencapaian KKM merupakan upaya yang harus dilakukan bersama antara guru, peserta didik, pimpinan satuan pendidikan dan orang tua. Melalui *workshop* yang diadakan di SMK Ma'arif NU Jatirejo Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru-guru yang mengajar di SMK Ma'arif NU Jatirejo Kabupaten Mojokerto terutama dalam menetapkan KKM. Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian tindakan sekolah(PTS) sekaligus sebagai sarana pengembangan profesinya (Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru), PTS merupakan penelitian yang berawal dari permasalahan sekolah, diselesaikan melalui tindakan spesifik dari gagasan peneliti untuk menyelesaikan permasalahan sekolah. Instrumen penelitian meliputi angket, lembar observasi, dan hasil kinerja guru, dengan analisis data kualitatif sederhana dengan melihat lembar observasi pada saat pelaksanaan *workshop* berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan guru-guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal melalui pembinaan berupa *Workshop* di SMK Ma'arif NU Jatirejo Kabupaten Mojokerto dari siklus I ke siklus II telah mencapai target minimal yang telah ditetapkan yakni 85 %, artinya 85 % guru telah efektif dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal.

Kata Kunci : kinerja guru. KKM. *workshop*.

PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah khususnya melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus menerus berupaya melakukan berbagai perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan kita. Salah satu upaya yang sudah dan sedang dilakukan, yaitu berkaitan dengan faktor guru. Lahirnya Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah yang didalamnya memuat usaha pemerintah untuk menata dan memperbaiki mutu guru di Indonesia. Michael G. Fullan yang dikutip oleh Suyanto dan Djihad Hisyam (2000) mengemukakan bahwa "*educational change depends on what teachers do and think*…". Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan sangat bergantung pada "w*hat teachers do and think* ". atau dengan kata lain bergantung pada penguasaan kompetensi guru.

Sejalan dengan tantangan kehidupan global, peran dan tanggung jawab guru pada masa mendatang akan semakin kompleks, sehingga menuntut guru untuk senantiasa melakukan berbagai peningkatan dan penye-suaian penguasaan kompetensinya. Guru harus harus lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan proses pembelajaran siswa. Guru di masa mendatang tidak lagi menjadi satu-satunya orang yang paling *well informed* terhadap berbagai informasi dan pengetahuan yang sedang berkembang dan berinteraksi dengan manusia di jagat raya ini. Di masa depan, guru bukan satu-satunya orang yang lebih pandai di tengah-tengah siswanya. Jika guru tidak memahami mekanisme dan pola penyebaran informasi yang demikian cepat, ia akan terpuruk secara profesional. Kalau hal ini terjadi, ia akan kehilangan kepercayaan baik dari siswa, orang tua maupun masyarakat.

Untuk menghadapi tantangan profesionalitas tersebut, guru perlu berfikir secara antisipatif dan proaktif. Artinya, guru harus melakukan pembaruan ilmu dan pengetahuan yang dimilikinya secara terus menerus.

Sudah saatnya sebagai guru yang profesional apalagi sudah lulus sertifikasi seyogianya terus meningkatkan kompetensinya, termasuk di dalamnya dalam menetapkan kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM tidak ditetapkan secara ngawur dan semborono. Merupakan kontrak pedagogik antara guru dengan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Keberhasilan pencpaian KKM merupakan upaya yang harus dilakukan bersama antara guru, peserta didik, pimpinan satuan pendidikan dan orang tua. Pendidikan melakukan upaya pencapaian KKM dengan memaksimalkan proses pembelajaran dan penilaian. Peserta didik melakukan upaya pencapaian KKM dengan proaktif mengikuti kegiatan pembelajaran serta mengerjakan tugas-tugas yang telah didesains pendidik. Orang tua dapat membantu dengan memberikan motivasi dan dukungan penuh bagi putra-putrinya dalam mengikuti pembelajaran. Melalui *workshop* yang diadakan oleh SMK Ma'arif NU Jatirejo Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru terutama dalam menetapkan KKM.

Pengertian Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan. KKM harus ditetapkan diawal tahun ajaran oleh satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran di satuan pendidikan atau beberapa satuan pendidikan yang memiliki karakteristik yang hampir sama. Pertimbangan pendidik atau forum MGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama penetapan KKM.

Relevansi antara *Workshop* dan Peningkatan Kinerja Guru dalam Menetapkan KKM

Dalam kaitannya dengan pembinaan kemampuan guru melalui *Workshop*, maka Amstrong (1990:209) bahwa tujuan *Workshop* adalah untuk memperoleh tingkat kemampuan yang diperlukan dalam pekerjaan mereka dengan cepat dan ekonomis dan mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada sehingga prestasi mereka pada tugas yang sekarang ditingkatkan dan mereka dipersiapkan untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Siswanto (1989:139) mengatakan *Workshop* bertujuan untuk memperoleh nilai tambah seseorang yang bersangkutan, terutama yang berhubungan dengan meningkatnya dan berkembangnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang bersangkutan. *Workshop* dimaksud untuk mem-pertinggi kemampuan dengan mengembangkan cara-cara berpikir dan bertindak yang tepat serta pengetahuan tentang tugas pekerjaan termasuk tugas dalam melaksanakan evaluasi diri (As'ad, 1987:64).

Dari paparan di atas, menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal melalui kegiatan *Workshop* yang lebih menekan-kan pada metode kolaboratif konsultatif akan memberikan kesempatan *sharing* antara satu guru dengan guru lain. Dengan demikian pema-haman terhadap Kriteria Ketuntasan Minimal dapat ditingkatkan baik dalam teoritisnya maupun implementasinya. Dengan demikian dapat diduga bahwa melalui *Workshop* dapat meningkatkan kemampuan guru dalam penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal melalui *Workshop* yang diselenggarakan oleh pengawas. Tindakan yang akan dilakukan adalah *Workshop* Peningkatan Kemampuan Guru dalam Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal. Jenis penelitian tindakan yang dipilih adalah jenis emansipatori. Jenis emansipatori ini dianggap paling tepat karena penelitian ini dilakukan untuk mengatasi permasalah pada wilayah kerja penliti sendiri berdasarkan pengalaman sehari-hari. Dengan kata lain, berdasarkan hasil observasi, refleksi diri, guru bersedia melakukan perubahan sehingga kinerjanya sebagai pendidik akan mengalami perubahan secara meningkat. Langkah-langkah PTS meliputi kegiatan-kegiatan : perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi.

Perencanaan, Perencanaan adalah langkah awal

yang dilakukan peneliti saat akan memulai tindakannya.

Pelaksanaan (Tindakan) adalah penerapan dari perencanaan.

Pengamatan (observasi) dan Evaluasi adalah pencermatan terhadap pelaksanaan tindakan. Hal-hal yang diamati adalah proses tindakan yang berlangsung selama tahap pelaksanaan PTS. Pengamatan menggunakan instrumen yang berisi indikator-indikator proses tindakan. Evaluasi adalah proses penetapan hasil pelaksanaan tindakan berdasarkan indikator-indikator tujuan PTS yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan refleksi.

Refleksi dilakukan terhadap proses dan hasil pelaksanaan tindakan dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki rencana tindakan pada siklus berikutnya untuk meningkatkan hasil yang lebih baik

Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah guru-guru SMK Ma'arif NU Jatirejo Kabupaten Mojokerto yang berjumlah 18 orang, terdiri dari guru-guru mata pelajaran UN dan non-UN. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal.

Penelitian dilakukan di SMK Ma'arif NU Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Pemilihan lokasi penelitian, karena sekolah tersebut merupakan sekolah binaan peneliti. Di samping itu, dari hasil supervisi ditemukan kelemahan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan dari bulan Agustus 2019 sampai dengan Nopember 2019.

Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus masing-masing siklus terdiri atas : Perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Secara rinci prosedur penelitian mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

Siklus I

Perencanaan, Beberapa kegiatan yang dilaku-kan adalah sebagai berikut : 1) Mengumpulkan guru melalui undangan Kepala Sekolah; 2) Menyusun Instrumen; 3) Menyusun jadwal *Workshop* : hari, tanggal, jam, dan tempat; 4) Menyiapkan materi *Workshop*; 5) Meminta guru membawa bahan-bahan seperti : Kuriku-lum, Silabus, RPP, dan sebagainya; 6) Menyiap-kan konsumsi untuk *Workshop*; 7) Meminta dalam satu kelompok membawa 1 laptop.

Pelaksanaan, 1) Pengarahan Kepala Sekolah sekaligus sebagai asalah satu nara sumber; 2) Pemaparan Kriteria Ketuntasan Minimal; 3) Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal masing-masing mata pelajaran; 4) Tanya jawab; 5) Presentasi kelompok kecil; 6) Revisi; 7) Presentasi visual Kriteria Ketiuntasan Minimal.

Observasi, 1) Kesiapan mental dan fisik guru; 2) Kesiapan bahan-bahan yang dibawa guru pada saat *Workshop*; 3) Kehadiran guru; 4) Kesiapan sarana dan prasarana; 5) Hasil sementara : Proses pelaksanaan *Workshop*, Kualitas KKM, Respon guru.

Refleksi, Dalam tahap refleksi peneliti melakukan pengkajian ulang tindakan yang telah dilakukan terhadap subyek penelitian yang telah direkam/didokumentasikan dari tahap observasi. Langkah refleksi ini ditujukan untuk mencari alur pemikiran yang logis dalam kerangka kerja proses, problem, dan hambatan yang muncul dalam perencanaan tindakan strategic. Langkah refleksi juga dapat digunakan untuk menjawab variasi situasi faktual di kelas dan dampak yang muncul sebagai konsekuensi tindakan.

Siklus II

Pada dasarnya siklus II memiliki prosedur yang sama dengan siklus I, hanya saja diadakan perbaikan pada hal-hal yang dilihat ada kelemahan serta memperhatikan hal-hal yang sudah berjalan dengan baik. Tidak menutup kemungkinan juga dilakukan modifikasi terhadap hal-hal sudah baik supaya tindakan yang diberikan tidak membosankan.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan sederetan pertanyaan atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1) Lembar Observasi; 2) Hasil kinerja guru-guru peserta *workshop*; 3) Angket

Analisis Data

Metode analisis data meliputi: 1) Analisis lembar aktivitas guru dalam mengikuti *workshop*; 2) Hasil pekerjaan guru dalam menetapkan KKM

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Hasil Siklus I

Perencanaan, 1) Berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menyampaikan penelitian dan minta masukan tentang masalah yang ada sekaligus membicarakan masalah teknis, waktu pelaksanaan penelitian, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian dan atau *Workshop* yang dilaksanakan; 2) Bersama pengawas, Kepala Sekolah memberikan materi kriteria ketuntasan minimal (KKM); 3) Mengelompokkan guru berdasarkan mata pelajaran; 4) Menelaah konsep kriteria ketuntasan minimal; 5) Mendiskusikan konsep kriteria ketuntasan minimal (KKM) dan presentasi kelompok; 6) Presentasi Kelas; 7) Menghasilkan KKM yang sesuai dengan hasil *workshop*.

Pelaksanaan Tindakan, Pada tahap ini dilakukan berbagai langkah yakni : 1) Absensi peserta; 2) Pengarahan Kepala sekolah; 3) Pengarahan umum pada seluruh peserta; 4) Peserta dikelompokkan; 5) Mengkaji : kompetensi inti (KI), kompetensi dasar (KD) dan Indikator yang ada pada silabus; 6) Guru membuat analisis per indikator; 7) Presentasi visual Kriteria Ketuntasan Minimal

Hasil Observasi, Kegiatan peserta juga diobservasi, mengenai : kesiapan mental dan fisik guru, kesiapan bahan-bahan yang dibawa guru pada waktu *Workshop*, kehadiran guru, kesiapan laptop, kualitas KKM, dan respon guru.

Dari hasil pengamatan terhadap aktivitas peserta yang berjumlah 18 orang dengan menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan, diperoleh data sebagai berikut : bahwa pada aspek kasiapan mental dan fisik; 15 orang atau 81,81% peserta siap dan 3 orang atau 18,19% tergolong belum siap. Pada aspek kesiapan bahan; tampak 8 orang atau 45,45% peserta siap dan 10 orang atau 54,54% belum siap. Pada aspek kehadiran guru tampak 16 atau 88,63% hadir dan 2 orang atau 11,37 tidak hadir. Pada aspek kesiapan laptop tampak 3 orang atau 18,19% siap dan 15 orang atau 81,81% belum siap.

Berdasarkan dekripsi ini tempaknya kesiapan guru dalam mengikuti *Workshop* belum memenuhi kriteria keberhasilan untuk semua aspek.

Dari hasil evaluasi terhadap penetapan KKM yang dibuat oleh 18 orang yang mengikuti *Workshop* pada siklus I adalah sebagai berikut : Penetapan KKM mata pelajaran memperhatikan tiga aspek; kompleksitas, daya dukung, dan intake nilai rata-rata 84,62 (84,62%); KKM dibuat per indikator, kemudian KD, SK, dan terakhir mata pelajaran nilai rata-rata 60,26 (60,26%); Hasil penetepan KKM oleh guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah nilai rata-rata 84,62 (84,62%); KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan Dinas Pendidikan nilai rata-rata 100 (100%); KKM dicantumkan dalam LHB nilai rata-rata 100 (100%). Jumlah rata-rata 83,75.

Dari diatas pada aspek Penetapan KKM mata pelajaran memperhatikan kompleksitas, daya dukung dan intake dalam katagori baik, pada aspek KKM dibuat per indikator, kemudian KD, SK, dan terakhir mata pelajaran dalam katagori cukup, aspek pengesahan oleh Kepala Sekolah berada pada kagori baik, kemudian untuk aspek no. 4 dan 5 bagaimanapun caranya guru mendapatkan KKM pasti disosialisasikan pada siswa, orang tua, dan ditulis dalam LHB.

Berdasarkan deskripsi dari data diatas tampaknya kemampuan guru dalam menetapkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) guru-guru SMK Ma'arif NU Jatirejo Kabupaten Mojokerto belum memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan pada semua aspek (kecuali aspek 4 dan 5 diatas tadi).

Refleksi, Dari hasil yang diperoleh menun-jukkan kemampuan guru dalam menetapkan KKM pada siklus I belum menunjukkan hasil sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Setelah diadakan refleksi terhadap hasil yang diperoleh, diputuskan untuk mem-perbaiki dari segi kegiatan *workshop* terutama memperjelas tentang aspek-aspek yang belum sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari hasil tersebut tampak secara umum guru membuat KKM per KD, dan tidak per indikator, dan dari 18 orang ikut *Workshop,* 6 orang tidak bisa menyerahkan hasil yang mungkin karena kesiapan fisik, mental, bahan, dan laptop memang kurang. Dari masalah tersebut, diputuskan untuk memperbaiki bebera-pa langkah dalam siklus I, yakni memfokuskan pada penetapan KKM per indikator, yang belum menyerahkan hasil, dan peningkatan sarana/ bahan diadakan pada siklus II.

Deskripsi Hasil Siklus II

Pada siklus II, langkah-langkah yang diambil sesuai dengan refleksi hasil siklus I, dengan memfokuskan pada penjelasan aspek-aspek yang belum dipahami guru dalam menetapkan kriteria ketuntasan minimal KKM), lebih menitik beratkan pada aspek pembimbingan secara individu. Dari 18 orang guru semua dilibatkan dalam siklus II untuk memperdalam pengetahuan tentang penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal. Setelah siklus II dijelaskan yang mengacu pada refleksi dan pemecahan masalah pada siklus II diperoleh data seabgai berikut : pada aspek kesiapan mental dan fisik 15 orang atau 88,63% siap dan 3 orang atau 11,37% tidak siap. Pada aspek kesiapan bahan : tampak bahwa 15 orang atau 88,63% siap dan 3 orang atau 11,37 tidak siap. Pada kehadiran 16 orang hadir atau 90,90% dan 2 orang atau 9,010% tidak hadir. Pada aspek kesiapan laptop tampak bahwa 11 orang atau 63,63% siap dan 7 orang atau 36,37% tidak siap.

Berdasarkan deskripsi ini tampaknya kesiapan guru dalam mengikuti *Workshop* belum memenuhi 100% untuk semua aspek, mungkin karena kebanyakan guru pengabdi, yang masuk jika ada jam mengajar.

Dari hasil evaluasi terhadap penetapan KKM yang dibuat oleh 18 orang yang mengikuti *Workshop* pada siklus II adalah sebagai berikut : Penetapan KKM mata pela-jaran memperhatikan tiga aspek; kompleksitas, daya dukung, dan intake nilai rata-rata 100 (100%); KKM dibuat per indikator, kemudian KD, SK, dan terakhir mata pelajaran nilai rata-rata 66,25 (66,25%); Hasil penetepan KKM oleh guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah nilai rata-rata 100 (100%); KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan Dinas Pendidikan nilai rata-rata 100 (100%); KKM dicantumkan dalam LHB nilai rata-rata 100 (100%). Jumlah rata-rata 93,25.

Dari data diatas, bila dilihat dari rata-rata secara umum dalam penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal pada siklus II berada pada amat baik (rata-rata 93,25), namun ada satu aspek yang belum bisa 100%, bahkan berada pada kriteria cukup yaitu pada aspek 2 (KKM dibuat per indikator, kemudian KD, KI, terakhir mata pelajaran).

Untuk hal ini dapat peneliti jelaskan bahwa pada pelaksanaan *workshop* 9 orang guru tidak tetap (pengabdi) kesulitan dalam mengembangkan silabus, RPP, dan penetapan indikator pada KI, SK, dan mata pelajaran, sehingga akhirnya KKM dibuat tidak per indikator.

Penilaian ini penting dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang respon guru terhadap kegiatan *Workshop* yang telah di harapkan dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal. Jika kita lihat dari nilai atau prosentase guru yang dapat menetapkan KKM dengan memenuhi mekanisme dari kajian awal, siklus I, dan siklus II adalah 6%, 83,75%, dan kemudian 93,25% ini menunjukkan peningkatan yang sangat berarti. Jadi dapat dikatakan bahwa respon guru sangat positip. Oleh karena itu, penerapannya perlu dilanjutkan dalam kegiatan-kegiatan yang lain.

Respon Peserta terhadap Pelaksanaan *Workshop* untuk menentukan KKM

Setelah pelaksanaan siklus II berakhir sebagai penutup dari penelitian dilakukan pengisian angket tentang tanggapan atau respon peserta terhadap pelaksanan *Workshop*. Berdasarkan pengamatan diperoleh data bahwa sebanyak 89.74% peserta menyukai pelaksanaan *workshop*.

Peserta ikut berperan dalam diskusi kelompok mendapat respon peserta sebanyak 89.74%, sekitar 12.82% peserta menjawab kadang-kadang dan 0 menjawab tidak. Menentukan KKM dengan pelaksanaan *workshop* dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan peserta mendapat respon sekitar 71.79%, serta 20.51% peserta menjawab kadang-kadang dan 7.69% menjawab tidak. Peneliti menanyakan pada peserta apakah peserta ikut berfikir dan menjawab mendapat respon sekitar 53.84% serta kadang-kadang sekitar 38.46% dan yang menjawab tidak 7.69%.

Peserta mendapat kepuasan ketika menentukan KKM dengan pelaksanaan work-shop mendapat respon sekitar 69.23%, 20.51% menjawab kadang-kadang dan 10.26% menja-wab tidak. Narasumber dalam menyampaikan materi gampang dimengerti mendapat respon 58.97% menjawab kadang-kadang dan 25.64% menjawab tidak. Mengerjakan tugas yang diberikan dari narasumber mendapat respon 7.69%, 33.33%

kadang-kadang dan 30.77% menjawab tidak.

Pada saat mengikuti *workshop*, anda percaya bahwa dapat berhasil jika berusaha keras mendapat respon dari peserta sekitar 76.92%, 15.36% menjawab kadang-kadang dan menjawab tidak sejumlah 7.69%. Pengetahuan yang anda miliki sebelumnya membantu dalam *workshop* ini mendapat respon sekitar 84.62%, dan 7.69% menjawab kadang-kadang dan 7.69% menjawab tidak. Memperoleh masukan yang cukup untuk menentukan KKM setelah mengikuti *workshop* mendapat respon dari peserta 94.87%, 5.13% menjawab kadang-kadang dan jawaban tidak)%. Dalam *workshop* ini anda sering berperilaku yang tidak relevan (misal makan, ngobrol sendiri, bermain-main, ijin keluar, dll mendapat respon 97.44%, 2.56% menjawab kadang-kadang dan 0 menjawab tidak.

Peserta berminat mengikuti *workshop* yang berikutnya mendapat respon 84.62%, 10.26% menjawab kadang-kadang dan 7.69% menjawab tidak. respon yang didapat 74.36%, 12.82% menjawab kadang-kadang dan 10.26% menjawab tidak. Dalam kegiatan *workshop* sering berperilaku yang tidak relevan (misal makan, ngobrol sendiri, bermain-main, ijin keluar, dll ? mendapat respon 10.26%, 43.59% menjawab kadang-kadang dan 48.78% menjawab tidak. Peserta berminta mengikuti *workshop* yang berikutnya mendapat respon 92.31%, 2.56% menjawab kadang-kadang dan 28.21% menjawab tidak. Menurut anda menentukan KKM dengan pelaksanaan *workshop* perlu diadakan mendapat respon 66.67%, 20.51% menjawab kadang-kadang dan 12.82% menjawab tidak.

Dari persentase yang diperoleh seperti terlihat dalam tabel 4.5 yang menunjukkan persentase yang paling tinggi dari pilihan peserta *workshop* adalah apakah anda pada saat mengikuti *workshop*, anda percaya bahwa dapat berhasil.

PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan aktifitas peserta dalam kegiatan *Workshop* tentang Peningkatan Kemampuan Guru dalam Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal bagi guru-guru SMK Ma'arif NU Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Di samping itu juga terjadi peningkatan kemam-puan guru dalam menetapkan kriteria ketunta-san minimal (KKM) melalui *workshop* di SMK Ma'arif NU Jatirejo Kabupaten Mojokerto dari siklus I ke siklus II pada masing-masing aspek dengan target ketercapaian sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui *workshop* dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menetapkan kriteria ketuntasan minimal (KKM) di SMK Ma'arif NU Jatirejo Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan tindakan ini disebabkan oleh pemahaman secara menyeluruh tentang Kriteria Ketuntasan Minimal Sangat diperlukan. Dengan pemahaman yang baik, maka penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal dengan baik. Mengoptimalkan pemahaman guru terhadap Kriteria Ketuntasan Minimal melalui pembina intensip dalam bentuk penyelenggaraan *Workshop* menunjuk pada metode kooperatif konsultatif dimana diharapkan para guru berdiskusi, bekerja sama dan berkonsultasi secara aktif. Aktifitas ini akan sangat membantu mereka dalam memahami Kriteria Ketuntasan Minimal akhirnya nanti mereka mampu menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal.

Dalam kaitannya dengan pembinaan melalui *Workshop*, maka penelitian ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan Amstrong (1990:209) bahwa tujuan *workshop* ádalah untuk memperoleh tingkat kemampuan yang diperlukan dalam pekerjaan mereka dengan cepat dan ekonomis dan mengembangkan kemampuan-kemampuan yang ada sehingga prestasi mereka pada tugas yang Sekarang ditingkatkan dan mereka dipersiapkan untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang. Siswanto (1989:139) mengatakan *workshop* bertujuan untuk mempe-roleh nilai tambah seseorang yang bersangku-tan, terutama yang berhubungan dengan me-ningkatnya dan berkembangnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang bersangkutan. *Workshop* dimaksudkan untuk mempertinggi kemampuan dengan mengembangkan cara-cara berpikir dan bertindak yang tepat serta pengetahuan tentang tugas pekerjaan termasuk tugas dalam melaksanakan evaluasi diri (As' ad, 1987:64). Pelaksanaan *workshop* guru-guru SMK Ma'arif NU Jatirejo Kabupaten Mojokerto direspon dengan baik oleh peserta hal ini dapat dilihat dari

aktivitas peserta *workshop* dan pengisian angket yang diisi oleh peserta *workshop*.

Dari paparan di atas, menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan *workshop* yang lebih menekankan pada metode kolaboratif konsultatif akan memberi-kan kesempatan *sharing* antara satu guru dengan guru lain. Dengan demikian, pemaha-man terhadap Kriteria Ketuntasan Minimal dapat ditingkatkan baik dalam teoritisnya maupun dalam implementasinya.

Berdasarkan analisis dan pembahasan seperti yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan aktifitas peserta dalamkegiatan *workshop* tentang Peningkatan Kemampuan Guru dalam Menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal bagi guru di SMK Ma'arif NU Jatirejo Kabupaten Mojokerto.

Disamping itu juga terjadi peningkatan kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal melalui *Workshop* di SMK Ma'arif NU Jatirejo Kabupaten Mojokerto dari Siklus I ke Siklus II pada masing-masing aspek dengan target ketercapaian sesuai dengan Indikator Keberhasilan yang ditetapkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui *workshop* dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal di SMK Ma'arif NU Jatirejo Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan tindakan ini disebabkan oleh kemampuan pemahaman yang baik dari guruyang ikut serta dalam *workshop*. Pemahaman yang komprehensif tentang Kriteria Ketuntasan Minimal Sangat diperlukan. Dengan pemahaman yang baik, maka penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal dapat diterapkan juga dengan baik oleh guru pada mata pelajaran yang diasuhnya. Efektivitas untuk mengoptimalkan pemahaman guru terhadap Kriteria Ketuntasan Minimal melalui pembinaan yang intensif dalam bentuk penyelenggaraan *workshop*. Penerapan metode kooperatif konsultatif dalam kegiatan *workshop* juga sangat membentu guru untuk memahami materi KKM secara menyeluruh, dimana diharapkan para guru dapat berdiskusi, bekerja sama dan berkonsultasi secara aktif.

PENUTUP

Simpulan

1. Proses pelaksanaan penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal melalui *Workshop* untuk peningkatan kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal dimulai dari supervisi awal. Supervisi awal dilakukan untuk mengenali masalah yang ada dalam penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal. Langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil supervisi kemudian ditindak lanjuti dengan mengadakan *workshop. Workshop* dilakukan dengan menggunakan tahapan-tahapan yang lebih menekankan pengetahuan praktis sehingga mudah dicerna oleh guru. Selanjutnya adalah memberikan latihan menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan. Untuk meyakinkan guru membuat Kriteria Ketuntasan Minimal dilakukan presentasi pada masing-masing kelompok guru mata pelajaran. Peneliti mengamati dan menilai Kriteria Ketuntasan Minimal yang telah ditetapkan guru. Dari penilaian tersebut kemudian dievaluasi bagian mana yang belum sesuai dengan Kriteria, kemudian dilanjutkan dengan perbaikan. Melalui tahapan tersebut guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal meningkat.
2. Terjadi peningkatan kesiapan peserta dalam kegiatan *Workshop* di SMK Ma'arif NU Jatirejo Kabupaten Mojokerto. Di samping itu juga, terjadi peningkatan kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal melalui pembinaan berupa *Workshop* di SMK Ma'arif NU Jatirejo Kabupaten Mojokerto dari siklus I ke siklus II dan mencapai target minimal yang telah ditetapkan yakni 85%, artinya 85% guru telah efektif dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui Workshop dapat meningkatkan kemampuan guru-guru SMK Ma'arif NU Jatirejo dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal.
3. Guru-guru SMK Ma'arif NU Jatirejo Kabupaten Mojokerto memberikan respon yang sangat positif terhadap kegiatan penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal melalui *Workshop*. Dengan demikian kegiatan *Workshop* memberikan dampak positif terhadap kemampuan guru dalam menetapkan

Kriteria Ketuntasan Minimal.

Saran

1. Para guru sebaiknya menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal dengan memperhatikan mekanisme, yaitu prinsip dan langkah-langkah penetapan.
2. Agar pembinaan melalui *Workshop* dapat berjalan secara efektif, maka semua guru harus mampu bekerja sama dengan peserta lain yang bersifat kolaboratif konsultatif.
3. Peningkatan kemampuan guru dalam penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal akan berjalan dengan efektif bila semua komponen sekolah mempasilitasi kegiatan tersebut secara rutin.
4. Sebaiknya pemerintah senantiasa mempasilitasi dalam semua kegiatan dalam rangka meningkatkan kemampuan guru dalam menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal.
5. Membiasakan untuk mengembangkan budaya mutu disekolah sehingga target dalam meningkatkan mutu pendidikan dapat tercapai.
6. Pembinaan menetapkan Kriteria Ketuntasan Minimal melalui *Workshop*, dapat dijadikan salah satu alternatif meningkatkan kompetensi guru dalam pengembangan proses belajar mengajar.

DAFTAR RUJUKAN

Mathis dan Jackson . 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba Empat.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 tahun 2005 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar danMenengah Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*, Jakarta: Fokus Media.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang *Standar Isi*, Jakarta, 2006.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Standar Kompetensi Lulusan*, Jakarta, 2006.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang *Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan s*ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 tahun 2006 tentang *RincianTugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.* Jakarta: Direktorat Jenderal ManajemenPendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang *Standar Penilaian Pendidikan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sudibyo, Bambang. 2004. *Model dan Teknik Penilaian pada Tingkat Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.* Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.

Sungkowo M, 2004. *Perangkat Penilaian Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas*. Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*,Jakarta: Fokus Media.